

## MEMAHAMI DIMENSI ETIS DAMPAK *COUNTRY RISK*

**Gunardi Endro**

*Bakrie School of Management*

*gunardi.endro@bakrie.ac.id*

### **ABSTRAK**

*Untuk memahami dimensi etis dampak country risk, saya mengajukan pemakaian tiga pola hubungan ekonomi, yaitu hubungan eksklusif, hubungan semi-eksklusif dan hubungan inklusif. Dari ketiga hubungan itu, etika risiko menunjukkan bahwa keputusan yang etis mensyaratkan agen ekonomi untuk memiliki sensitivitas moral, menerapkan komunikasi risiko yang demokratis melalui penerapan good governance, dan mengimplementasikan tanggung jawab sosial yang menghormati otonomi setiap agen ekonomi lain.*

### **PENDAHULUAN**

Dimensi etis suatu persoalan berkaitan dengan bagaimana persoalan itu menjadi ada, siapa saja pihak yang terlibat dan bertanggung-jawab, serta bagaimana persoalan itu pada akhirnya mempengaruhi siapapun yang terlibat untuk menjalani kehidupan yang baik (*the good life*). Tergantung pada kompleksitas persoalan, dimensi etis persoalan bisa saja mudah dipahami dan bisa pula menjadi sulit dirumuskan. Dampak *country risk* sendiri bukanlah persoalan sederhana karena pihak-pihak yang terlibat tidak hanya individu ataupun kelompok individu, tetapi juga institusi-institusi sosial seperti pemerintah, pasar, perusahaan, dan organisasi-organisasi berskala lokal, nasional dan global. Pertanyaan etis terkait *country risk* yang mungkin muncul misalnya: apakah adil bagi kelompok penduduk miskin yang terpaksa menganggur karena merosotnya jumlah investasi sebagai akibat *country risk* yang semakin buruk?, sudah hilangkah sensitivitas moral dari pemerintah negara-negara industri maju yang tak mau memberi pinjaman untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di negara yang mempunyai *country risk* tinggi?, dan etiskah perbuatan individu atau perusahaan yang dalam krisis moneter ikut-ikutan berspekulasi mata uang domestik yang akibatnya justru semakin memperburuk *country risk* dan melemahnya iklim investasi? Pertanyaan-pertanyaan berdimensi etis semacam itu sangat bervariasi. Dalam *paper* ini, saya akan coba memberikan sketsa ringkas untuk memahami dimensi etis dari dampak

### **Proceeding**

#### **Konferensi Nasional**

Dampak Country Risk terhadap Perusahaan  
Ditinjau dari Aspek Manajemen & Akuntansi

#### **Diselenggarakan oleh:**

Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis (PSEB)

Fakultas Ekonomi

Universitas Kristen Duta Wacana – Yogyakarta

Kerjasama dengan The University of New South Wales  
Yogyakarta, 8 Agustus 2009

penggunaan *country risk* sebagai acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

### Etika Risiko dan *Country Risk*

Kata “risiko (*risk*)” mengandung makna ketidakpastian (*uncertainty*). Namun kata “ketidakpastian” sebenarnya lebih bernuansa subjektif, sementara kata “risiko” lebih bernuansa objektif karena sering diekspresikan secara kuantitatif dalam bentuk tingkat probabilitas kejadian (Hansson, 2007). Pada penggunaan kata ketidakpastian, subjek mengakui keterbatasan pengetahuannya tentang apa yang akan atau tidak akan terjadi di masa mendatang tetapi tak bisa menjelaskan tingkat probabilitasnya. Kalau ketidakpastian melingkupi kemungkinan kejadian yang menguntungkan dan kemungkinan kejadian yang merugikan, risiko *hanya* berkaitan dengan kejadian yang merugikan atau yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, risiko sering didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mengandung kemungkinan munculnya akibat buruk yang tidak sesuai dengan harapan (keinginan). Definisi tersebut tetap bertahan meskipun ada istilah “risiko spekulatif” yang mengacu pada risiko yang sengaja diciptakan dengan harapan memperoleh keuntungan (yang diinginkan) dan istilah “risiko murni” yang memang hanya berkaitan dengan kemungkinan rugi atau sekedar tak-rugi yang tidak diinginkan (Vaughan, 1997: 14). Kedua istilah itu berguna untuk menjelaskan sikap orang yang berbeda-beda dalam menghadapi risiko, yaitu sikap mencintai risiko (*risk lover*), menghindari risiko (*risk averse*), dan sikap netral terhadap risiko (*risk neutral*). Dalam ekonomi pasar, perbedaan sikap terhadap risiko seperti itu dapat dipahami dalam kerangka kompensasi beban risiko dengan ganjaran (*the risk-reward trade-off*).

Keberadaan risiko sesungguhnya tak terlepas dari dinamika kehidupan manusia. Kemajuan peradaban manusia bisa terjadi karena manusia berani menghadapi risiko dalam mencoba teknologi dan konstelasi sosial yang belum pernah diterapkan. Memang berbeda dari spesies lain, manusia bukan hanya memiliki kemampuan mengidentifikasi kemungkinan buruk tetapi juga mempunyai kemampuan mengantisipasi kemungkinan itu sebaik mungkin. Masalahnya, peradaban baru yang lebih maju tampaknya membawa risiko baru yang lebih banyak, lebih kompleks, dan lebih besar. Terlebih lagi adanya kenyataan bahwa sebagian orang menjadi subjek pengendali gerak maju peradaban, berikut risiko yang ditanggung bersama, sementara sebagian lainnya tak mampu menjadi subjek tetapi ikut menanggung risiko. Oleh karena itu, tanggung jawab dan *tanggung jawab sosial* manusia dalam peradaban yang lebih maju seharusnya menjadi lebih besar. Begitu pula yang seharusnya berlaku dalam dunia bisnis dan ekonomi modern yang semakin kompleks dan mengglobal sekarang ini.

Isu tanggung jawab sosial dalam kaitannya dengan risiko dunia bisnis dan ekonomi modern terungkap misalnya pada persoalan kebijakan ekonomi yang memberi kemudahan bagi sebagian kecil agen ekonomi untuk melakukan spekulasi yang bisa berrisiko pada memburuknya kondisi makroekonomi. Spekulasi bisa jadi dilakukan dengan sengaja oleh agen-agen ekonomi besar untuk meruntuhkan kinerja ekonomi setempat dan bisa pula dilakukan hanya sekedar untuk mengeruk keuntungan buat diri sendiri tanpa motif memperburuk kondisi ekonomi. Namun risiko memburuknya kondisi ekonomi seperti itu terpaksa harus ditanggung juga secara bersama-sama oleh agen ekonomi lain yang tidak ikut berspekulasi dan yang bahkan “menolak” setiap aktivitas bisnis spekulatif. Persoalannya tidaklah sederhana mengingat bisnis sudah dalam dirinya mengandung unsur spekulasi, sekecil apapun. Bukankah dengan begitu semua agen ekonomi sebenarnya melakukan permainan spekulatif bersama-sama? Betul dan memang barangkali sulit menolak unsur spekulatif bisnis. Tapi, meskipun semua bisnis bisa dikatakan sebagai “permainan spekulatif”, bisnis yang secara sistematis mentransfer risiko tanpa memberikan kompensasi kepada agen ekonomi lain dan mengakibatkan hilangnya otonomi agen ekonomi untuk melakukan usahanya harus dipertanyakan kualitas moralnya. Disinilah tanggung jawab sosial bisnis dan etika menjadi penting.



Analisis etika risiko menjadi semakin kompleks ketika ada kesaling-tergantungan yang semakin kuat antar agen-agen ekonomi lintas negara, terutama dalam era globalisasi sekarang ini. Melakukan transaksi ekonomi dengan agen yang berada di negara lain mengandung risiko wanprestasi sistematis yang disebut *country risk*. Secara ringkas *country risk* dapat dijelaskan sebagai kemungkinan agen ekonomi suatu negara tidak mau atau tidak mampu melakukan tindakan atau memenuhi kewajiban ekonomi karena alasan yang sifatnya sistematis (Tarzi, 1997:483-4). Tiga komponen utama *country risk* adalah risiko finansial, risiko ekonomi, dan risiko politik. Risiko politik mempengaruhi ketidak-mampuan agen, sedangkan risiko finansial dan risiko ekonomi menentukan ketidak-mampuannya untuk melakukan tindakan atau memenuhi kewajiban ekonomi (Erb, Harvey and Viskanta, 1996). Komponen lain yang bisa mempengaruhi ketidak-mauan agen untuk melakukan tindakan ekonomi atau memenuhi kewajiban ekonomi (misalnya pembayaran tepat waktu) adalah kebiasaan dan budaya setempat (Coyle, 2000: 67). Kebiasaan konsumen untuk membeli hanya produk lokal atau memboikot produk impor sebagai sikap protes terhadap politik negara luar bisa jadi merupakan faktor *country risk* yang penting untuk dipertimbangkan (Madura, 2006: 549).

Praktisnya, *country risk* mempunyai dampak sistematis dan makroekonomis (Oxelheim dan Wihlborg, 1997).<sup>3</sup> Dampak memburuknya *country risk* tak hanya dirasakan oleh agen-agen ekonomi domestik yang secara langsung melakukan transaksi dengan agen ekonomi luar negeri, tetapi dirasakan pula oleh agen ekonomi domestik yang sama sekali tak melakukan transaksi dengan agen ekonomi luar negeri. Buruknya *country risk* yang ditandai oleh berkurangnya permintaan pasar internasional terhadap produk ekspor akan mengakibatkan berkurangnya permintaan bahan baku yang dipasok oleh agen-agen ekonomi domestik. Jadi, analisis etika risiko transaksi ekonomi lintas negara menjadi semakin luas meliputi agen-agen ekonomi yang berada di luar lingkup perekonomian nasional. Untuk memudahkan analisis etika risiko, saya akan menggunakan tiga macam pola dasar hubungan dari transaksi ekonomi yang mempertimbangkan *country risk* dalam proses pengambilan keputusan, yaitu hubungan eksklusif, hubungan semi-eksklusif, dan hubungan inklusif.

#### Dimensi Etis Pola Hubungan Ekonomi Eksklusif

Pola ini menggambarkan bagaimana agen ekonomi (agen bisnis atau pemerintah) negara industri maju (*developed country*) menggunakan *country risk* untuk menyeleksi dan melakukan transaksi dengan agen ekonomi negara berkembang (*developing country*). Bagi agen ekonomi

negara maju atau negara asing, *country risk* menjadi sangat penting untuk merepresentasikan *counterparty risk*; seolah-olah transaksi dilakukannya dengan sosok negara berkembang yang secara keseluruhan tabiatnya diwakili oleh *country risk*. Hubungan antara agen asing dan negara berkembang sering kali diperlakukan tak lebih sebagai hubungan transaksional dimana jarak yang ada menghalangi agen asing untuk mempunyai rasa kepedulian terhadap perekonomian negara berkembang tersebut. Tingkat risiko transaksi (risiko bisnis) dijelaskan sebagian besar oleh tingkat *country risk*.

Pada pola hubungan eksklusif, transaksi ekonomi cenderung dimaknai sebagai proses *amoral*, yaitu suatu proses yang tidak ada sangkut-pautnya dengan moralitas dan etika. Kepentingan agen ekonomi asing sering kali hanya terfokus pada harapan bahwa pembayaran pokok hutang dan bunganya lancar tepat waktu, perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan tanpa hambatan, investasi portofolio mudah dicairkan, dan investasi langsung (*Foreign Direct Investment*) bebas dari gangguan ekspropriasi. *Country risk* seolah-olah hanya menjelaskan seberapa jauh harapan itu tidak akan menjadi kenyataan. Untuk mengurangi dampak risiko *country risk* yang besar, agen ekonomi asing melakukan diversifikasi melalui transaksi dengan negara-negara lain yang mempunyai *country risk* lebih baik. Dan tanggung jawab sosial dari adanya dampak *country risk* cenderung mau dibebankan sepenuhnya kepada agen-agen ekonomi internal negara setempat.

Namun prinsip *amoral* transaksi ekonomi tidaklah tepat. Di dalam harapan agen asing tersebut sebenarnya sudah terkandung asumsi bahwa etika akan dihormati sebagai landasan transaksi ekonomi, yaitu kemauan *counterparty* untuk memenuhi kewajiban ekonomi akan selalu ada dan kemampuan untuk itu akan selalu diperjuangkan meskipun dalam keadaan sulit. Kalau dimensi etis transaksi ekonomi diakui, agen ekonomi asing seharusnya melihat *counterparty*-nya sebagai entitas moral. Dengan begitu, tanggung jawab sosial agen ekonomi negara maju menjadi relevan karena sensitivitas moral agen tersebut seharusnya ada terhadap penderitaan sebagian besar rakyat dari negara yang mempunyai *country risk* tinggi (Emunds, 2003: 340). Krisis finansial Asia 1997-98 bisa dipandang sebagai akibat dari langkanya sensitivitas moral agen ekonomi negara industri maju. Pada saat itu penarikan kapital mendadak (*capital flight*) sebesar 100 milyar dolar Amerika Serikat lebih dari negara Korea Selatan, Indonesia, Thailand dan Malaysia mengakibatkan terciptanya jutaan penganggur baru dan puluhan juta orang miskin (Friedman, 1998; UNDP, 1999).<sup>4</sup> Di Indonesia sendiri tercipta



sekitar 3,8 – 5,4 juta penganggur baru dan 21 – 40 juta orang yang terpaksa harus hidup di bawah garis kemiskinan, sebagai akibat dari krisis itu.

Memang penyebab krisis finansial 1997-98 masih bisa diperdebatkan: siapa yang menggeser risiko, tanpa kompensasi, kepada siapa? Tidak sedikit ekonom yang berpendapat bahwa agen-agen ekonomi negara yang terkena krisislah yang memperburuk risiko sendiri dan sudah sewajarnya agen ekonomi asing menyelamatkan diri dari kebangkrutan finansial yang dipicu oleh kesulitan yang diciptakan sendiri oleh *counterparty*.<sup>6</sup> Peranan agen-agen ekonomi domestik dalam memperburuk *country risk* dengan meraja-lemahnya korupsi, investasi yang tidak efisien, pengontrolan hutang yang lemah, dan kebijakan sistem perbankan yang buruk telah diidentifikasi sebelum krisis. Di Indonesia sendiri, berdasarkan perhitungan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) saat itu, ketidak-efisienan ekonomi terindikasi sebesar 30% dan banyak proyek konglomerasi besar berisiko memperburuk risiko makro (*country risk*) lantaran biayanya di-*mark-up* dan hasilnya tidak mendatangkan pemasukan devisa untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan (Rusli, 1994). Kalau fundamental ekonomi domestik sendiri memang sudah buruk, apakah tindakan agen ekonomi asing yang menarik kapitalnya patut dipersoalkan?

Tak akan ada gunanya mencari landasan etis kalau sejak awal seseorang tak mempunyai sensitivitas moral.<sup>7</sup> Demikian pula etika tak akan bisa masuk pertimbangan ketika sejak awal transaksi ekonomi mau dipertahankan sebagai proses *amoral*. Jadi, baik agen ekonomi asing maupun (apalagi) agen ekonomi domestik, mempunyai kewajiban moral mengambil keputusan ekonomi yang tepat kalau masih mempunyai sensitivitas moral dan mau memelihara kehidupan yang baik. Dalam kerangka hubungan ekonomi yang eksklusif, keputusan masing-masing pihak akan menjadi tidak tepat bila mengganggu “kesehatan” atau kemampuan pihak lain untuk mengambil keputusan yang tepat. Keputusan agen ekonomi domestik yang jelas memperburuk *country risk*, atau memperburuk kesehatan ekonomi domestik, bukanlah keputusan yang tepat. Keputusan agen ekonomi asing yang menarik kapitalnya mendadak tanpa peduli akibat buruknya bagi kesehatan *counterparty* (ekonomi domestik), bukan pula keputusan yang tepat. Akan lebih tepat bagi kreditor dan investor asing untuk menjadwalkan penarikan atau pembayaran hutang agen domestik sehingga memberi kesempatan ekonomi domestik untuk mengkonsolidasi dan mengembalikan kesehatannya. Komitmen moral untuk mengambil keputusan yang tepat seperti itu mungkin tak memberikan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi akan membuahkan keuntungan dan

manfaat jangka panjang, salah satunya kestabilan sistem finansial dan ekonomi internasional yang diharapkan bersama (Emunds, 2003).

### Dimensi Etis Pola Hubungan Ekonomi Semi-eksklusif

Pada pola hubungan semi-eksklusif, agen ekonomi asing secara aktif terlibat berinteraksi dan menumbuhkan pasar domestik tetapi menjaga jarak dari komunitas di luar pasar. Pola hubungan seperti ini bisa menggambarkan bagaimana tumbuh pesatnya *the emerging economies* yang menjalani transformasi sistematis untuk mengakomodasi kapital dari negara industri maju. Disini, agen ekonomi asing selalu ingin memonitor *country risk* untuk memastikan bahwa lingkungan usaha dimana kapital ditempatkan masih kondusif.

Karena kekuatan kapitalnya yang besar, agen ekonomi asing sering kali menghadapi godaan untuk bertindak *immoral* yang akibatnya bisa merugikan pasar domestik dan komunitas di luar pasar. Kekuatan bank investasi global, misalnya, relatif sangat besar dibandingkan ukuran pasar saham domestik negara berkembang, sehingga mereka bisa mudah tergoda untuk mendestabilisasi pasar saham hanya karena alasan bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan keuntungan signifikan dalam pasar yang kecil adalah dengan mendestabilisasikannya (Plender, 2003: 48-9). Jadi, agen ekonomi asing bisa saja secara aktif memperburuk *country risk* melalui operasinya di dalam pasar domestik untuk mengeruk keuntungan bagi diri sendiri. *Country risk* seolah-olah dilihat sebagai fungsi resultant dari risiko bisnis-bisnis yang dilakukan di negara setempat. Godaan moral terhadap agen ekonomi asing juga bisa terjadi pada investasi langsung di sektor ekonomi riil (*Foreign Direct Investment*). Eksploitasi sumber daya alam oleh investor asing tanpa mempertimbangkan kerusakan lingkungan mungkin hanya menguntungkan sebagian agen ekonomi domestik tapi bisa amat merugikan sebagian besar agen lain dan generasi mendatang.

Pola hubungan ekonomi semi-eksklusif seperti ini bisa menimbulkan polarisasi internal di dalam masyarakat domestik, yaitu polarisasi antara kelompok minoritas yang bisa terlibat dengan masuknya kapital dari negara industri maju dan kelompok mayoritas yang tidak terlibat tapi ikut menanggung risiko dari masuknya kapital tersebut (Brown, 1988: 48). Kolaborasi segitiga terjadi antara kelompok minoritas, agen ekonomi asing, dan pemerintah untuk apa yang biasanya disebut “pembangunan (*development*)”,<sup>8</sup> sementara kelompok mayoritas diasumsikan akan mendapatkan manfaat dari proses yang biasanya disebut “efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*)”. Masalah etis yang muncul terkait dengan tidak adanya informasi yang jelas tentang risiko yang



terpaksa harus ditanggung kelompok mayoritas dan terabainya kerelaan kelompok mayoritas itu untuk ikut menanggung risiko. Posisi tawar kelompok mayoritas memang rendah sehingga seringkali terpaksa ikut mengalami krisis ekonomi yang datang lebih cepat daripada kesempatan merasakan manfaat dari efek tetesan ke bawah. Bagaimana mengatasi masalah etis seperti ini? Secara umum dapat dikatakan bahwa kalau belum ada mekanisme komunikasi risiko yang demokratis dan distribusi tanggung jawab yang jelas, setiap agen ekonomi asing maupun domestik seharusnya menjaga agar masuknya setiap kapital dari luar tidak menciptakan ketidakstabilan finansial dan ekonomi dan terpuruknya *country risk*. Salah satu unsur mekanisme yang dimaksud adalah penerapan *good governance* yang meliputi setidaknya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kalau hal ini dipertimbangkan, kelompok mayoritas tak lagi diperlakukan sebagai pihak terabaikan melainkan sebagai *stakeholder* yang harus diperhitungkan kepentingannya. Pola hubungan ekonomi pun mulai bergeser menjadi inklusif.

#### Dimensi Etis Pola Hubungan Ekonomi Inklusif

Agen ekonomi asing diposisikan sama dengan agen ekonomi domestik pada pola hubungan inklusif. Jadi rasa tanggung jawab yang dimilikinya terhadap tingkat *country risk* tak berbeda dengan rasa tanggung jawab agen domestik, bukan karena alasan nasionalisme, melainkan demi keberlangsungan penempatan kapital dalam sistem ekonomi setempat. Kepedulian terhadap kelompok mayoritas dan nasib generasi mendatang yang tak terlibat atau tidak mendapat manfaat langsung dari penempatan kapital tersebut dimanifestasikan dengan program-program sosial yang pada tingkat perusahaan sering diperdebatkan sebagai *Corporate Social Responsibility* (Eiteman, Stonehill dan Moffett, 2007: 571). Pola ini merupakan pola hubungan ekonomi yang secara etis paling ideal dalam kaitannya dengan *country risk*. Fokus agen ekonomi asing bukan lagi sekedar menyeleksi alternatif-alternatif penempatan kapital dengan menggunakan acuan tingkat *country risk* ataupun mengeksploitasi tingkat *country risk* sebagai cerminan lingkungan usaha setempat untuk memaksimalkan keuntungan, melainkan menggunakan *country risk* dalam manajemen risiko dan pengambilan keputusan yang baik sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh agen ekonomi domestik. *Country risk* seolah-olah merepresentasikan betul-betul risiko bisnis (*business risk*).

Akan tetapi, persoalan etis muncul dari adanya kekuatan ekonomi yang tidak simetris. Berhubung kekuatan agen ekonomi asing umumnya cukup besar untuk mempengaruhi ekonomi setempat, ada potensi strategi

bahwa arah kebijakan pembangunan dan perkembangan masyarakat setempat bisa didikte dari luar oleh agen ekonomi asing. Bilamana pasar kapital domestik tidak membatasi kepemilikan asing, isu-isu etis yang berkaitan dengan pengambilalihan kepemilikan secara kasar (*hostile takeover*) pun muncul. Lebih luas lagi, konflik kultural dan konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan tentang hidup yang baik (*the good life*) bisa terjadi. Kalau konflik seperti itu menjadi tak terkendali, sentimen negatif masyarakat setempat terhadap agen ekonomi asing akan memunculkan kembali polarisasi negara berkembang versus negara maju (Brummersted, 1988: 79), dan pola hubungan ekonomi pun akan terdorong ke arah pola hubungan ekonomi yang eksklusif.

Oleh karena itu dalam keterlibatannya di dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat setempat, agen ekonomi asing perlu meminimalkan potensi konflik yang *counter-productive*, misalnya dengan berpegang pada prinsip subsidiaritas. Entitas-entitas yang terbantu perkembangannya harus dibiarkan menjalani proses sesuai dengan kemampuan dan keyakinannya sendiri tentang hidup yang baik. Mengikuti Amartya Sen, pembangunan ekonomi selayaknya diarahkan menjadi upaya pembebasan atau peningkatan kebebasan dan, dengan demikian, merupakan pembangunan yang otentik sesuai dengan ciri khasnya (Emunds, 2003: 341). Dengan berpegang pada prinsip subsidiaritas itu, agen ekonomi asing akan memupuk rasa saling percaya (*trust*) dengan *stakeholdernya*, dan rasa saling percaya itu akan memantapkan transaksi ekonomi serta menciptakan kehidupan dunia yang lebih ramah (Michalos, 1990).

Begitu pula bagi agen ekonomi domestik, masalah *country risk* tidak hanya masalah dampak yang dirasakannya tetapi juga masalah tanggung jawab sosial untuk tidak memperburuk tingkat *country risk* yang merugikan kelompok mayoritas. Reaksi agen ekonomi domestik terhadap dampak *country risk* tidaklah netral secara etis, karena reaksi tertentu bisa memperburuk *country risk* dan mempunyai implikasi sosial yang luas. Jadi, reaksi perusahaan industrial dan bahkan ibu-ibu rumah tangga kaya yang berduyun-duyun ikut spekulasi menukarkan mata uang rupiah menjadi dolar Amerika

Serikat ketika krisis moneter menerpa Indonesia tahun 1997 (*The Economist*, 1997) bukanlah suatu perbuatan yang secara sosial bertanggung-jawab. Mereka memperlemah nilai mata uang rupiah yang dipegang oleh kelompok mayoritas, yaitu kelompok yang tak tau dan tak mampu spekulasi tetapi terpaksa menanggung akibat buruk dari spekulasi dan krisis.<sup>9</sup> Setiap agen ekonomi, baik asing maupun domestik, mempunyai tanggung jawab sosial dari pemanfaatan kapital yang dimilikinya atau



penggunaan kekuatan ekonominya. Hak milik tidaklah absolut tapi mempunyai dimensi tanggung jawab sosial.

### KESIMPULAN

Integrasi ekonomi domestik dengan ekonomi global berakibat munculnya pertimbangan *country risk*. Melalui tiga pola hubungan yang dipakai disini sebagai kerangka untuk menelusuri dampak *country risk*, etika risiko menunjukkan bahwa setiap keputusan agen ekonomi, baik asing maupun domestik, mempunyai dampak sistematis yang bisa merugikan agen ekonomi lain atau kelompok mayoritas. Pada pola hubungan eksklusif, pertimbangan *country risk* yang etis mensyaratkan adanya sensitivitas moral dari agen ekonomi. Pola hubungan semi-eksklusif memperlihatkan bahwa agen ekonomi mudah tergelincir melakukan keputusan *immoral* yang merugikan kelompok mayoritas dan untuk mengatasinya perlu ada mekanisme komunikasi risiko yang demokratis melalui penerapan prinsip *good governance*. Pola hubungan inklusif merupakan pola hubungan ideal tapi tak akan membuahkan keputusan yang betul-betul etis tanpa penerapan tanggung jawab sosial yang menghormati otonomi setiap agen ekonomi. Dalam kenyataannya, ketiga pola hubungan itu tak secara eksplisit terpisah satu sama lain meskipun satu pola bisa saja lebih menonjol daripada pola yang lain. Pelajaran yang dapat diambil dari penerapan ketiga pola tersebut adalah bahwa setiap pertimbangan *country risk* seharusnya disertai dengan sensitivitas moral, komunikasi risiko yang demokratis melalui penerapan prinsip *good governance*, dan tanggung jawab sosial yang menghormati otonomi agen lain. Tanpa itu, kehidupan yang baik sulit diciptakan. ###

9 Dalam kesetiaannya memegang mata uang rupiah, kelompok mayoritaslah yang sesungguhnya mempertahankan makna "country" pada kata "country risk". Pada konteks ini, bukankah ada nuansa bahwa agen ekonomi domestik yang ikut spekulasi mata uang bisa dikategorikan sebagai "agen ekonomi asing"?

### DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle. "Ethica Nicomachea – translated by W.D. Ross. " Dalam *The Basic Works of Aristotle*, ed. Richard McKeon, New York: The Modern Library, 2001.
- Atinc, Tamar Manuelyan, dan Michael Walton. "Social Consequences of the East Asian Financial Crisis." Paper presented in the World Bank's 1998 Annual Meetings (1998). <http://www.worldbank.org/research/pdf/EA-3.pdf>.
- Booth, Anne. "The Social Impact of the Asian Crisis: What Do We Know Two Years On?" *Asian-Pacific Economic Literature* 13:2 (November, 1999): 16-2
- Brown, Laurence. "Gambling with Development." Dalam *Global Risk Assessments: Issues, Concepts and Applications*, Book 3, ed. by Jerry Rogers, 46-58. Riverside, CA: Global Risk Assessments, Inc., 1988.
- Brummersted, David A. "Host Country Behavior: Issues and Concepts in Comparative Political Risk Analysis." Dalam *Global Risk Assessments: Issues, Concepts and Applications*, Book 3, ed. by Jerry Rogers, 75-97. Riverside, CA: Global Risk Assessments, Inc., 1988
- Coyle, Brian. *Measuring Credit Risk*. Caterbury – Kent UK: CIB Publishing, 2000.
- Djohanputro, Bramantyo. *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta: Penerbit PPM, 2008.
- Economist. "Asian Currencies: Downhill racers." *The Economist*, 20 December 2007.
- Eiteman, David K., Arthur L. Stonehill, dan Michael H. Moffett. *Multinational Business*

- Finance*. 11th edition. Pearson Addison Wesley, 2007.
- Emunds, Bernhard. "The Integration of Developing Countries into International Financial Markets: Remarks from the Perspective of an Economic Ethics." *Business Ethics Quarterly* 13:3 (2003): 337-59. Erb, Claude B., Campbell R. Harvey, dan Tadas E. Viskanta. "Political Risk, Economic Risk and Financial Risk." *Financial Analysts Journal* 52:6 (Nov/Dec, 1996): 29-46.
- Firdausy, C. Mulya. "The Impact of the Regional Economic Crisis on Employment and an Evaluation of Public Work Programmes in Indonesia." Presented as part of *EADN Regional Project on the Social Impact of the Asian Financial Crisis*. <http://www.eadn.org/eadnrr.html>. Jan., 200
- Friedman, David. "How Wall Street's Moral Hubris Condone Social Inequality." *Los Angeles Times*, 31 May 1998.
- Hansson, Sven Ove. "Risk." *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2007). <http://plato.stanford.edu/entries/risk/>
- Hill, Hal. "Indonesia in crisis: causes and consequences." Dalam *The Social Impact of the Asian Financial Crisis*, ed. Yun-Peng Chu dan Hal Hill, 127-166. Northampton, MA: Edward Elgar Publ., 2001.
- Krugman, Paul. "What happened to Asia." Dalam *Global Competition and Integration*, ed. Ryuzo Sato, Rama V. Ramachandran dan Kazuo Mino, 315-28. Boston: Kluwer Academic, 1998.
- Lee, Eddy. *The Asian Financial Crisis: The Challenge for Social Policy*. Geneva: International Labour Office, 1998.
- Madura, Jeff. *International Corporate Finance*. 8th edition. Thomson South-Western, 2006.

- Michalos, Alex C. "The Impact of Trust on Business, International Security and the Quality of Life." *Journal of Business Ethics* 9 (1990): 619-638.
- Oxelheim, Lars, dan Clas Wihlborg. *Managing in the Turbulent World Economy: Corporate Performance and Risk Exposure*. Chichester – West Sussex UK: John Wiley & Sons, 1997.
- Plender, John. *Going off the Rails: Global Capital and the Crisis of Legitimacy*. Chichester: John Wiley and Sons, 2003.
- Radelet, Steven, dan Jeffrey Sachs. "The Onset of the East Asian Financial Crisis." *National Bureau of Economic Research Working Paper Series*. Working Paper 6680 (1998). <http://www.nber.org/papers/w6680>
- Rusli, Ronnie H. "Pengertian Country Risk Factor dan Balance of Payment Dilihat dari Pendekatan Teori Keseimbangan." *Usahawan* 12 (Des., 1994): 10-14.
- Shrader-Frechette, Kristin S. "Environmental Risk and the Iron Triangle: the Case of Yucca Mountain." *Business Ethics Quarterly* 5: 4 (October 1995): 753-77.
- Tarzi, Shah M. "Country Risk Analysis, International Banking and the Developing Countries." *Journal of Social, Political, and Economic Studies* 22:4 (1997): 481-95.
- UNDP. *Human Development Report 1999*. Oxford University Press, 1999.
- Vaughan, Emmett J. *Risk Management*. John Wiley & Sons, Inc., 1997.